



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2021



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888).;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp924.474.356.434,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp78.273.184.748,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.888.234.800,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp434.780.328,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) .
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.950.169.620,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.888.234.800,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel Rp91.336.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.722.214.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp55.624.800,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- d. Pajak Reklame Rp91.805.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp7.381.025.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp7.865.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.025.865.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp434.780.328,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp281.734.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu Rp153.046.228,00 (seratus lima puluh tiga

juta empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)

- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp54.950.169.620,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - b. Jasa Giro Rp5.756.578.460,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
 - c. Pendapatan Bunga Rp4.218.767.123,00 (empat milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp15.730.019.910,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta

- sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.510.599.805,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah)
 - h. Pendapatan BLUD Rp19.597.872.446,00 (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.686.391.876,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp834.804.592.757,00 (delapan ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus empat juta

lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp770.516.993.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp770.516.993.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:
- a. Dana Perimbangan Rp733.304.227.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp292.849.745.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus

empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp397.785.704.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp42.668.778.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp37.212.766.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari bagi hasil pendapatan pajak provinsi.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.396.578.929,00 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan

ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.096.642.021.000,00 (satu trilyun sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp714.996.156.239,10 (tujuh ratus empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.357.170.366,74 (tiga ratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.228.089.844,36 (tiga ratus empat puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.400.496.028,00 (enam belas milyar empat ratus juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.010.400.000,00 (dua milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp356.357.170.366,74 (tiga ratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp174.474.928.865,74 (seratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh empat sen) yang terdiri dari:

1. Belanja Gaji Pokok ASN Rp14.006.4307.517,74 (seratus empat puluh milyar enam puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah dan tujuh puluh empat sen);
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp9.510.743.156,00 (sembilan milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah);
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.602.801.750,00 (empat milyar enam ratus dua juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp3.901.030.000,00 (tiga milyar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah);
5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp2.113.949.240,00 (dua milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
6. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp5.960.969.700,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp106.038.137,00 (seratus enam juta tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

8. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp1.269.768,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp7.061.538.110,00 (tujuh milyar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah);
10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp225.923.571,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp926.357.916,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
12. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp149.473.714.797,00 (seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp61.290.672.545,00 (enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

Rp2.108.159.487,00 (dua milyar seratus delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp2.602.113.954,00 (dua milyar enam ratus dua juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp2.840.664.519,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp80.632.104.292,00 (delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp26.510.850.504,00 (dua puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.049.532.550,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

2. Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.229.581.954,00 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp5.535.596.200,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp42.120.400,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp46.348.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Belanja Uang Paket DPRD Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp436.247.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.352.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 8. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 9. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp82.240.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 11. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH.
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp262.080.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp340.228.089.844,36 (tiga ratus empat puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus

empat puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:

a. Belanja Barang Rp88.358.503.565,82 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dan delapan puluh dua sen) yang terdiri dari:

1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp45.652.373.071,00 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);
2. Belanja Bahan/ Material Rp9.214.830.658,00 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
3. Belanja Cetak/ Penggandaan Rp10.379.779.888,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Belanja Makanan dan Minuman Rp14.546.430.000,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp492.638.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

6. Belanja Pakaian Kerja Rp397.880.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 7. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Rp1.653.100.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- b. Belanja Jasa Rp143.959.039.900,54 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan lima puluh empat sen) yang terdiri dari:
1. Belanja Jasa Kantor Rp124.087.679.985,54,00 (seratus dua puluh empat milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah dan lima puluh empat sen);
 2. Belanja Jasa Asuransi Rp11.266.080.200,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 3. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Rp1.572.911.960,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp2.668.277.130,00 (dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

5. Belanja Sewa Alat Berat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 6. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Belanja Jasa Konsultansi Rp2.359.474.025,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah);
 8. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 9. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK Rp1.655.116.600,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp16.416.807.288,00 (enam belas milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp2.958.663.250,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp6.557.472.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp2.529.720.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp4.193.052.038,00 (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp64.985.009.090,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp24.958.387.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp40.026.622.090,00 (empat puluh milyar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah).
- e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Rp23.927.050.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp10.660.134.000,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga Rp0,00 (nol rupiah);
3. Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp2.581.680.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp16.400.496.028,00 (enam belas milyar empat ratus juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp4.310.500.000,00 (empat milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.463.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

2. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.847.500.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja Hibah Dana BOS Rp11.396.578.930,00 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri.
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp693.417.098,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.010.400.000,00 (dua milyar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp244.709.790.964,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.104.405.600,00 (empat milyar seratus empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.183.613.357,00 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.068.066.033,00 (empat puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.316.995.974,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp36.710.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp244.709.790.964,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal tanah Rp4.104.405.600,00 (empat milyar seratus empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanah Persil Rp3.804.405.600,00 (tiga milyar delapan ratus empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp3.204.405.600,00 (tiga milyar dua ratus empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Lapangan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. Belanja Modal Tanah untuk Makam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- h. Belanja Modal Lapangan Lainnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar 23.183.613.357,00 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Rp2.816.999.834,00 (dua milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - g. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- h. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp806.999.834,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp 806.999.834,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Ukur Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Pengolahan Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
 - (10) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

- (11) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.980.278.008,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Kantor Rp782.775.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (13) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- (14) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- (15) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp658.375.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (16) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.194.503.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- (17) Belanja Modal Meubelair Rp 2.135.603.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- (18) Belanja Modal Alat Pembersih Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (19) Belanja Modal Alat Pendingin Rp 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (20) Belanja Modal Alat Dapur Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- (21) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.530.400.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- (22) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (23) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp1.003.000.008,00 (satu milyar tiga juta delapan rupiah);
- (24) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp262.000.002,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua rupiah);
- (25) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp351.000.002,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua rupiah);
- (26) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (27) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- (28) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp 270.000.004,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat rupiah);
- (29) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- (30) Belanja Modal Alat Studio Rp 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- (31) Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- (32) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (33) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (34) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (35) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp9.693.561.615,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah);
- (36) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp 2.602.061.615,00 (dua milyar enam ratus dua juta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah);
- (37) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp 712.808.542,00 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- (38) Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik Rp 1.671.153.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (39) Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah Rp218.100.073,00 (dua ratus delapan belas juta seratus ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- (40) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp7.091.500.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (41) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp7.091.500.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (42) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp410.816.900,00 (empat ratus sepuluh juta

delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);

- (43) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
Rp 330.816.900,00 (tiga ratus tiga puluh juta
delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus
rupiah);
- (44) Belanja Modal Alat Laboratorium
Mikro Biologi Teknik Penyehatan
Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh
lima juta rupiah);
- (45) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
Rp45.816.900,00 (empat puluh lima juta delapan
ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
- (46) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (47) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (48) Belanja Modal Komputer
Rp2.091.107.000,00 (dua milyar sembilan puluh
satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
- (49) Belanja Modal Komputer Unit
Rp1.916.507.000,00 (satu milyar sembilan ratus
enam belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- (50) Belanja Modal Komputer Jaringan
Rp134.707.000,00 (seratus tiga puluh empat juta
tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- (51) Belanja Modal Personal Computer
Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh
tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (52) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
Rp1.114.000.000,00 (satu milyar seratus empat
belas juta rupiah);

- (53) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp 174.600.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (54) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- (55) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp56.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- (56) Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- (57) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- (58) Belanja Modal Elektronik/Electric Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- (59) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (60) Belanja Modal Alat Pelindung Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (61) Belanja Modal Baju Pengaman Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (62) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp 616.550.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (63) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp239.550.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- (64) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp239.550.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (65) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Rp377.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- (66) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- (67) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- (68) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar 47.068.066.033,00 (empat puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) diri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp45.125.466.033,00 (empat puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp43.172.260.033,00 (empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp1.278.720.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp 24.916.906.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp5.000.321.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp1.314.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- i. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- j. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- k. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp6.806.553.033,00 (enam milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- l. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp3.007.260.000,00 (tiga milyar tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- m. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp1.953.206.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - n. Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Rp201.200.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - o. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.752.006.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu rupiah);
 - p. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1,942,600,000.00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - q. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp1,942,600,000.00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - r. Belanja Modal Pagar Rp1,942,600,000.00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (69) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp170,316,995,974.00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp123,972,815,974.00 (seratus dua puluh

tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan
Rp114,400,861,974.00 (seratus empat belas milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. Belanja Modal Jalan Kabupaten
Rp98,013,624,478.00 (sembilan puluh delapan milyar tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
3. Belanja Modal Jalan Lainnya
Rp 16,387,237,496.00 (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Belanja Modal Jembatan
Rp 9,571,954,000.00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp 257,354,000.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Belanja Modal Jembatan Lainnya
Rp 9,314,600,000.00 (sembilan milyar

tiga ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

7. Belanja Modal Bangunan Air Rp19,491,404,000.00 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah);
8. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp3,261,587,000.00 (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp449,400,000.00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
10. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp 153,600,000.00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
11. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp2.658.587.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
12. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp15.018.794.000,00 (lima belas milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
13. Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut Rp15.018.794.000,00 (lima belas milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

14. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp1.211.023.000,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 15. Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp117.784.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 16. Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai Rp713.960.000,00 tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 17. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp 379.279.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Instalasi Rp 25.380.114.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp 5.980.126.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 2. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp 5.980.126.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

3. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Rp9.607.628.000,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 4. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya Rp9.607.628.000,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Jaringan Rp1.472.662.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp1.452.662.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- c. Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 36.710.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

2. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
3. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Belanja Modal Alat Peraga Kesenian Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp126.936.073.796,90 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah dan sembilan puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.243.883.134,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.692.190.662,90 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah dan sembilan puluh sen).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.243.883.134,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp125.692.190.662,90 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah dan sembilan puluh sen) terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp120.951.833.762.00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp123.951.833.762,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp-3.000.000.000.00 (minus tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh

satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ranai,

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	110.687.500,00
4.1.01.06.02.	Pajak Motel	110.687.500,00
4.1.01.06.02.000	Pajak Motel	110.687.500,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.228.062.500,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00
4.1.01.07.01.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	17.500.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.05.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.07.000	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.08.09.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	93.000.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	77.000.000,00
4.1.01.09.01.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	77.000.000,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	11.000.000,00
4.1.01.09.02.000	Pajak Reklame Kain	11.000.000,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.03.000	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.09.05.000	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.610.000.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.000	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.01.10.02.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.11.01.000	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.12.01.000	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.013.000.000,00
4.1.01.14.05.	Pajak Batu Apung	11.000.000,00
4.1.01.14.05.000	Pajak Batu Apung	11.000.000,00
4.1.01.14.28.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	200.000.000,00
4.1.01.14.28.000	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	200.000.000,00
4.1.01.14.29.	Pajak Tanah Diatome	5.500.000,00
4.1.01.14.29.000	Pajak Tanah Diatome	5.500.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	796.500.000,00
4.1.01.14.37.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	796.500.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.218.000.000,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	1.218.000.000,00
4.1.01.15.01.000	PBBP2	1.218.000.000,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000,00
4.1.01.16.01.000	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	367.000.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
4.1.02.01.01.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.02.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.09.000	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.000	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	70.000.000,00
4.1.02.02.10.000	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	70.000.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	70.000.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.02.03.01.000	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.000	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	50.885.152.922,00
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	699.940.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	699.940.000,00
4.1.04.01.02.000	Hasil Penjualan Alat Angkutan	699.940.000,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	7.762.806.834,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.762.806.834,00
4.1.04.05.01.000	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.762.806.834,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	6.218.767.123,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.218.767.123,00
4.1.04.07.01.000	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.218.767.123,00
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.730.019.910,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.730.019.910,00
4.1.04.08.02.000	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.730.019.910,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.000	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	76.500.000,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00
4.1.04.12.15.000	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.500.000,00
4.1.04.12.16.000	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	16.500.000,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	1.510.599.805,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.599.805,00
4.1.04.15.03.000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.599.805,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.16.01.000	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.871.778.350,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.350,00
4.1.04.18.01.000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.350,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	890.901.455.386,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	826.613.855.629,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	719.003.580.629,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	190.674.452.629,00
4.2.01.01.01.000	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	76.291.547.607,00
4.2.01.01.01.000	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	10.686.386.000,00
4.2.01.01.01.000	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	47.329.081.000,00
4.2.01.01.01.000	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	53.542.788.022,00
4.2.01.01.01.000	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.649.180.000,00
4.2.01.01.01.001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	47.151.000,00
4.2.01.01.01.001	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	403.624.512.000,00
4.2.01.01.02.000	DAU	403.624.512.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.205.398.000,00
4.2.01.01.03.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.058.861.000,00
4.2.01.01.03.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.752.006.000,00
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	190.000.000,00
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.933.890.000,00
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.000.000.000,00
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.673.016.000,00
4.2.01.01.03.002	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.476.935.000,00
4.2.01.01.03.002	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.070.703.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.589.739.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	700.000.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.355.000.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.983.824.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.145.732.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.508.183.000,00
4.2.01.01.03.003	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.980.126.000,00
4.2.01.01.03.004	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.313.796.000,00
4.2.01.01.03.004	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.573.587.000,00
4.2.01.01.03.004	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	5.900.000.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	45.499.218.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.390.477.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	378.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.463.259.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.173.800.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	307.400.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.887.052.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	861.464.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	427.069.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.636.833.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	862.578.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	720.982.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	41.587.990.000,00
4.2.01.02.01.	DID	41.587.990.000,00
4.2.01.02.01.000	DID	41.587.990.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	66.022.285.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	66.022.285.000,00
4.2.01.05.01.000	Dana Desa	66.022.285.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.287.599.757,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	64.287.599.757,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.287.599.757,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.940.152.600,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.079.067.300,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.212.980.100,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	727.824.900,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.327.574.857,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.396.578.930,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.396.578.930,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	11.396.578.930,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.396.578.930,00
4.3.03.01.01.000	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.396.578.930,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
5.	BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	717.618.813.135,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	361.395.205.431,28
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	168.201.877.933,46
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	133.910.306.409,46
5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	133.910.306.409,46
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.642.111.298,00
5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.642.111.298,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.615.061.750,00
5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.615.061.750,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.901.030.000,00
5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.901.030.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.113.865.000,00
5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.113.865.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.957.059.020,00
5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.957.059.020,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	106.752.470,00
5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	106.752.470,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.681.140,00
5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.681.140,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.052.259.864,00
5.1.01.01.09.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.052.259.864,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	225.326.931,00
5.1.01.01.10.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	225.326.931,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	676.424.051,00
5.1.01.01.11.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	676.424.051,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	147.847.369.847,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.382.358.995,00
5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60.382.358.995,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.108.159.487,00
5.1.01.02.02.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.108.159.487,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.767.613.954,00
5.1.01.02.03.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.767.613.954,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.840.664.519,00
5.1.01.02.04.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.840.664.519,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	79.748.572.892,00
5.1.01.02.05.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	79.748.572.892,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.425.716.819,82
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	233.203.100,00
5.1.01.03.01.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	121.800.000,00
5.1.01.03.01.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	111.403.100,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.390.477.000,00
5.1.01.03.03.000	Belanja TPG PNSD	20.390.477.000,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.463.259.000,00
5.1.01.03.04.000	Belanja TKG PNSD	1.463.259.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	378.000.000,00
5.1.01.03.05.000	Belanja Tamsil Guru PNSD	378.000.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.037.632.550,00
5.1.01.03.06.000	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.037.632.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	11.869.945.169,82
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.560.935.169,82
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	110.560.000,00
5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	198.450.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	53.200.000,00
5.1.01.03.08.000	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	53.200.000,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.535.596.200,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.120.400,00
5.1.01.04.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.120.400,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	46.348.800,00
5.1.01.04.03.000	Belanja Tunjangan Beras DPRD	46.348.800,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	25.840.000,00
5.1.01.04.04.000	Belanja Uang Paket DPRD	25.840.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	436.247.000,00
5.1.01.04.05.000	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	436.247.000,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.06.000	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.800.000,00
5.1.01.04.07.000	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.800.000,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.352.000.000,00
5.1.01.04.08.000	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.352.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	588.000.000,00
5.1.01.04.09.000	Belanja Tunjangan Reses DPRD	588.000.000,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	82.240.000,00
5.1.01.04.12.000	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.840.000,00
5.1.01.04.12.000	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.600.000,00
5.1.01.04.12.000	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	66.800.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.836.000.000,00
5.1.01.04.13.000	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.836.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.000.000,00
5.1.01.04.14.000	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.000.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	507.510.201,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.768.000,00
5.1.01.05.01.000	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.768.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.599.440,00
5.1.01.05.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.599.440,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00
5.1.01.05.04.000	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.135,00
5.1.01.05.05.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.135,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00
5.1.01.05.06.000	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	103.816.345,00
5.1.01.05.07.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	103.816.345,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.08.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.329,00
5.1.01.05.09.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.329,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	260.000.000,00
5.1.01.05.10.000	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	35.000.000,00
5.1.01.05.10.000	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	225.000.000,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	595.040.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	262.080.000,00
5.1.01.06.01.000	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	262.080.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.06.02.000	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	2.282.094.430,00
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	2.282.094.430,00
5.1.01.88.88.888	Belanja Pegawai BOS	2.282.094.430,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.057.375.838,72
5.1.02.01.	Belanja Barang	75.862.964.467,18
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	75.862.964.467,18
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	104.500.000,00
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Kimia	466.950.000,00
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.297.524.242,00
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	280.600.000,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	37.006.000,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.535.189.659,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.112.442.810,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.500.000,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.771.954.758,18
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.961.685.250,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	945.025.776,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.900.000,00
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.329.994.000,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	494.350.000,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.000.000,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.765.600,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.118.112.250,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.665.450.038,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.01.01.004	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	207.317.075,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.216.880.500,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.769.868.000,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	40.000.000,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.056.929.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.870.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.800.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	285.768.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	304.841.510,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Penyelamatan	100.000.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	319.500.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Adat Daerah	232.300.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.950.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Olahraga	236.990.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Paskibraka	120.850.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Paskibraka	319.399.999,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	136.673.442.650,54
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	115.661.427.362,54
5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.721.314.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.351.300.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	157.100.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.517.481.954,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	103.900.000,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	37.800.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.000.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.503.077.512,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22.000.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	776.400.000,00
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.635.880.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	66.000.000,00
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	244.080.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.364.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.260.997.003,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	543.750.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	83.600.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Kalibrasi	155.774.200,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	985.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.200.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Tagihan Telepon	162.000.000,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Air	719.268.287,54
5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	4.684.498.865,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	667.351.544,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.106.424.736,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Paket/Pengiriman	239.457.000,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	745.208.261,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.798.683.648,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.431.038.400,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.363.145.248,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.000.000,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.500.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.604.678.130,00
5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.869.140.000,00
5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00
5.1.02.02.04.004	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	62.150.000,00
5.1.02.02.04.004	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	586.888.130,00
5.1.02.02.04.012	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00
5.1.02.02.04.041	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.000.000,00
5.1.02.02.04.041	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.500.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.821.882.960,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.265.690.000,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gudang	34.141.000,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	62.550.000,00
5.1.02.02.05.003	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	359.501.960,00
5.1.02.02.05.004	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	86.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.07.002	Belanja Sewa Alat Musik	42.500.000,00
5.1.02.02.07.003	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	44.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.077.526.950,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	70.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.291.965.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	415.561.950,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	183.000.000,00
5.1.02.02.11.000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	48.000.000,00
5.1.02.02.11.000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.439.743.600,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.092.345.000,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Sosialisasi	709.998.600,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	357.400.000,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Diklat Kepemimpinan	280.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	18.867.883.867,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	177.900.000,00
5.1.02.03.01.000	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.500.000,00
5.1.02.03.01.000	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	172.400.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.835.075.877,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.430.978.967,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.214.570,00
5.1.02.03.02.004	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	100.000.000,00
5.1.02.03.02.008	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	5.000.000,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	30.000.000,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	348.925.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.160.238.840,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	32.118.500,00
5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	180.400.000,00
5.1.02.03.02.013	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00
5.1.02.03.02.020	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00
5.1.02.03.02.021	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	40.000.000,00
5.1.02.03.02.023	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	480.000.000,00
5.1.02.03.02.033	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	40.000.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.200.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.000.000,00
5.1.02.03.02.041	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	215.000.000,00
5.1.02.03.02.041	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	91.000.000,00
5.1.02.03.02.044	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	40.000.000,00
5.1.02.03.02.049	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	275.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.999.987.990,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.458.948.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	245.000.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	43.000.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.435.614.263,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	34.715.637,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	893.600.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.000.000,00
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.878.260.090,00
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	323.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.03.002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	80.000.000,00
5.1.02.03.03.002	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	72.450.000,00
5.1.02.03.03.004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	26.000.000,00
5.1.02.03.03.005	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.03.005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	325.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.854.920.000,00
5.1.02.03.04.000	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.164.240.000,00
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	192.000.000,00
5.1.02.03.04.004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	211.200.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	57.480.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	75.013.144.830,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.711.178.640,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.021.478.640,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	689.700.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	301.966.190,00
5.1.02.04.02.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	301.966.190,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	866.244.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	806.244.000,00
5.1.02.05.01.000	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	806.244.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00
5.1.02.05.02.000	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.000.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.88.88.888	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.02.99.99.999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	28.145.601.865,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.622.169.022,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.463.000.000,00
5.1.05.05.01.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.463.000.000,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.245.111.022,00
5.1.05.05.02.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.649.977.000,00
5.1.05.05.02.000	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.595.134.022,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.914.058.000,00
5.1.05.05.03.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.914.058.000,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.000	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	5.020.630.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.01.01.000	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.521.230.000,00
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	103.040.000,00
5.1.06.03.01.000	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	103.040.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.418.190.000,00
5.1.06.03.02.000	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.418.190.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	242.080.304.865,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	5.984.405.600,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	2.130.000.000,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	650.000.000,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.204.405.600,00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	300.000.000,00
5.2.01.01.03.000	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	100.000.000,00
5.2.01.01.03.001	Belanja Modal Tanah untuk Makam	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.01.01.03.001	Belanja Modal Lapangan Lainnya	150.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.108.928.634,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.800.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	10.800.000,00
5.2.02.01.03.001	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	10.800.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.883.983.924,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.076.984.090,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	590.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	321.984.090,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	360.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	510.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	295.000.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	806.999.834,00
5.2.02.02.03.000	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	806.999.834,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	90.000.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	90.000.000,00
5.2.02.03.03.002	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	90.000.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.140.000.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.140.000.000,00
5.2.02.04.01.001	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.140.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.663.478.008,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	608.775.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	90.000.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.400.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	484.375.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.030.403.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Mebel	1.785.603.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pembersih	72.000.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pendingin	455.900.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Dapur	7.000.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.705.400.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.024.300.008,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	272.800.002,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	331.500.002,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	30.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	90.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	270.000.004,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	153.200.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	123.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.06.01.000	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.000.000,00
5.2.02.06.01.000	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	102.200.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00
5.2.02.06.02.000	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.703.838.542,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.637.338.542,00
5.2.02.07.01.000	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.634.994.756,00
5.2.02.07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.784.243.713,00
5.2.02.07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	218.100.073,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.066.500.000,00
5.2.02.07.02.000	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.066.500.000,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	410.816.900,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	289.500.000,00
5.2.02.08.01.000	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	285.000.000,00
5.2.02.08.01.002	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	4.500.000,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	80.000.000,00
5.2.02.08.03.001	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	80.000.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	41.316.900,00
5.2.02.08.08.000	Belanja Modal Peralatan Umum	41.316.900,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.638.176.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	2.177.307.200,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Komputer Jaringan	109.707.000,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Personal Computer	735.800.200,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.331.800.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	460.868.800,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	176.268.800,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Jaringan	120.000.000,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	164.600.000,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	228.500.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	228.500.000,00
5.2.02.11.02.000	Belanja Modal Elektronik/Electric	228.500.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.000.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	8.000.000,00
5.2.02.15.02.000	Belanja Modal Baju Pengaman	8.000.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	464.800.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	56.800.000,00
5.2.02.18.01.000	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	56.800.000,00
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	408.000.000,00
5.2.02.18.03.000	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	408.000.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.19.01.000	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	96.000.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.02.88.88.888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.838.954.943,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.005.354.943,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.749.037.175,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.232.340.000,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.310.000.000,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	208.594.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.052.090.142,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.329.500.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	144.000.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	192.000.000,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.816.553.033,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.114.460.000,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Taman	199.500.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.256.317.768,00
5.2.03.01.02.000	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	211.200.000,00
5.2.03.01.02.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.045.117.768,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.833.600.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.833.600.000,00
5.2.03.04.01.000	Belanja Modal Pagar	1.833.600.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.680.752.472,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.458.278.496,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	114.368.324.496,00
5.2.04.01.01.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.003.407.000,00
5.2.04.01.01.001	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.364.917.496,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	10.089.954.000,00
5.2.04.01.02.000	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	257.354.000,00
5.2.04.01.02.001	Belanja Modal Jembatan Lainnya	9.832.600.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	23.910.466.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.266.587.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	454.400.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	153.600.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.658.587.000,00
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.218.794.000,00
5.2.04.02.02.000	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	15.218.794.000,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.216.023.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	117.784.000,00
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	718.960.000,00
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	379.279.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.209.062.000,00
5.2.04.02.07.000	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.209.062.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	26.776.345.976,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.677.099.976,00
5.2.04.03.01.000	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.677.099.976,00
5.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	8.418.600.000,00
5.2.04.03.04.000	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	8.418.600.000,00
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	11.680.646.000,00
5.2.04.03.09.000	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	11.680.646.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	1.535.662.000,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.000.000,00
5.2.04.04.01.000	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.515.662.000,00
5.2.04.04.02.000	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.515.662.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.167.263.216,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.600.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	24.600.000,00
5.2.05.01.01.000	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	24.600.000,00
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	25.000.000,00
5.2.05.01.02.000	Belanja Modal Audio Visual	25.000.000,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12.110.000,00
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	12.110.000,00
5.2.05.02.01.000	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	12.110.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	605.553.216,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	605.553.216,00
5.2.05.88.88.888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	605.553.216,00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.2.05.99.99.999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.000	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	126.942.903.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.000	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.000	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	125.692.203.000,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.692.203.000,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	59.429.917.000,00
5.4.02.05.01.000	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	59.429.917.000,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	66.262.286.000,00
5.4.02.05.02.000	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	66.262.286.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(120.951.833.762,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	120.951.833.762,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.951.833.762,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	123.951.833.762,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	103.844.395.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	31.785.064.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	21.190.043.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	50.869.288.000,00
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.107.438.762,00
6.1.01.05.02.002	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	12.064.464.000,00
6.1.01.05.02.002	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	8.042.974.762,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.000	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL